

Review :
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

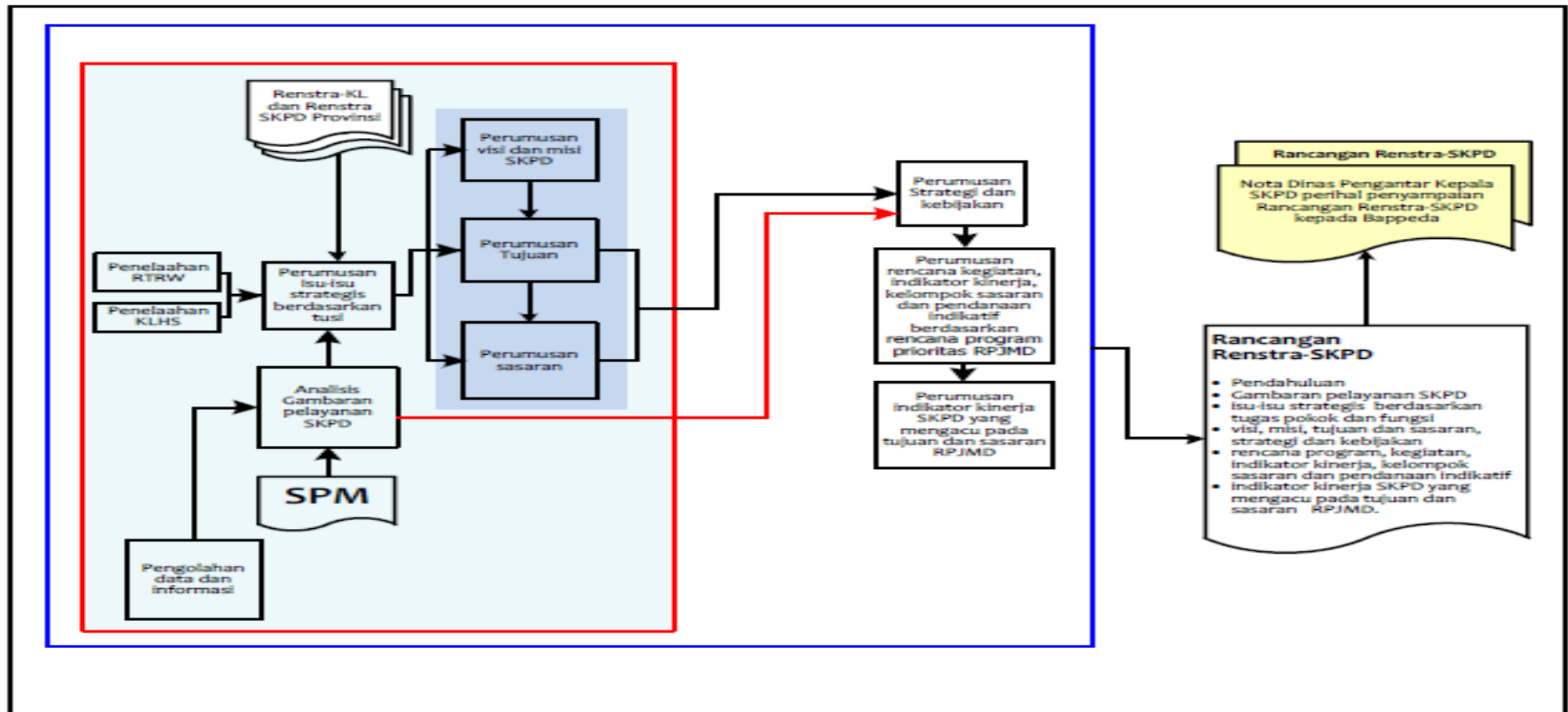
Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dibidang perhubungan. Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra- OPD) 2016 - 2021 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra- OPD) Dinas Perhubungan Tahun 2016 -2021 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018 dan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2014 -2019. sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini:

(gambar 1)

Gambar 1
Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah



B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
8. Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan,
9. Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30 Tahun 2016).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinhub dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Dinas Perhubungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Dinhub Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Purbalingga;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinhub Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinhub Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021 adalah sebagai berikut :

I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RENTRA Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra K/L.

B. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Dinhub.

B. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Dinhub, baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan, periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan, hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.
- D. Telaahan RT RW dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis.

IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

B. Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif.

VI. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Kedudukan Dinas Perhubungan (Dinhub) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 20 disebutkan tugas pokok Dinhubkominfo adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinhub mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Perhubungan ;
- c. Pelaksanaan program kerja dibidang Perhubungan;
- d. Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan dibidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan ;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- g. Penyuluhan dibidang Perhubungan ;
- h. Pengawasan dan pengendalian dibidang Perhubungan;
- i. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan dibidang Perhubungan ;

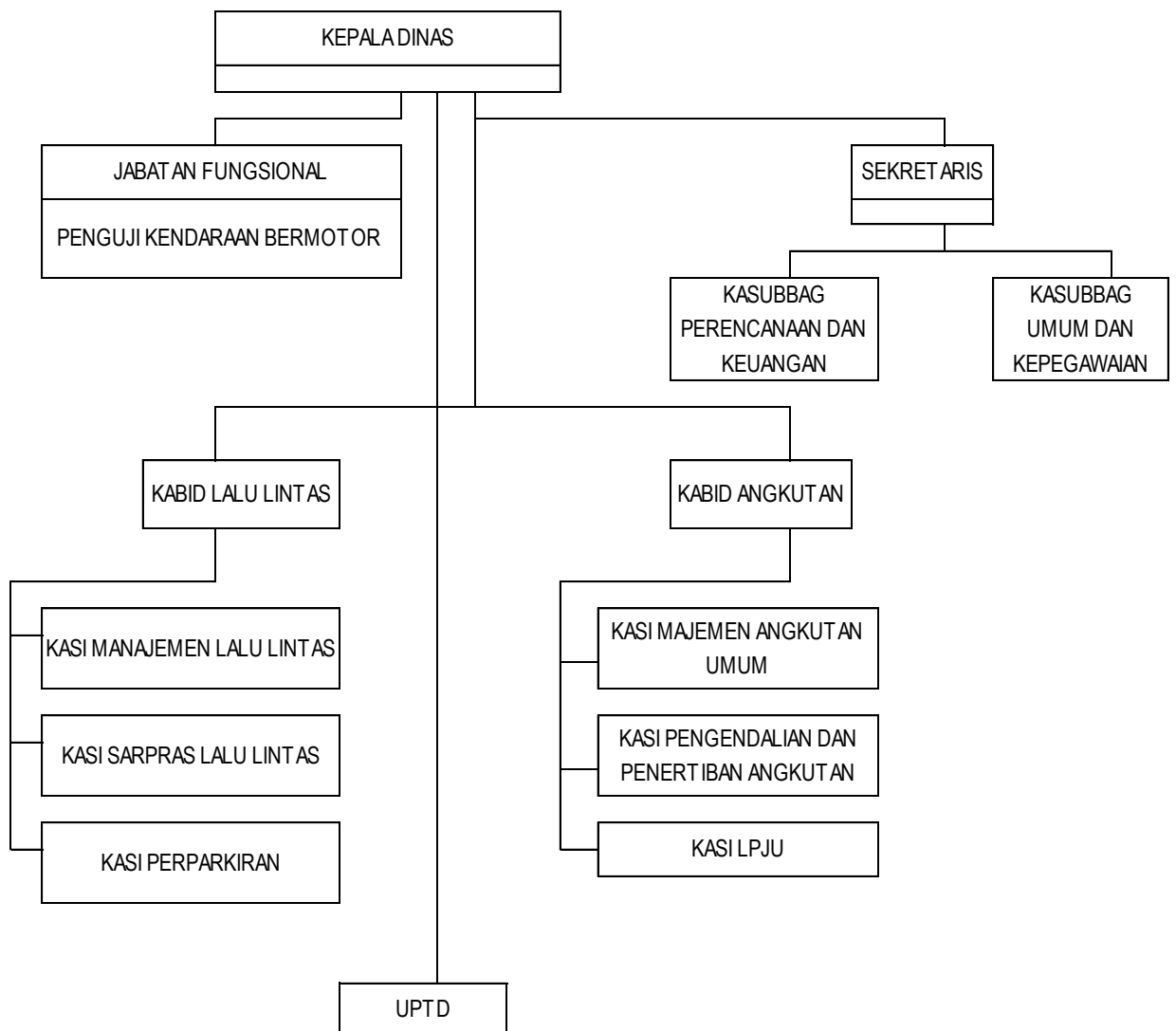
- j. Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- k. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut: (Gambar 2)

Gambar 2

Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN



Struktur organisasi DINAS PERHUBUNGAN, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat , terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas , terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 2. Seksi Manajemen Parkir
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
- d. Bidang Angkutan , terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Angkutan Umum
 - 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Angkutan
 - 3. Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum
- e. UPTD
- f. Kelompok jabatan fungsional

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 89 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dari masing-masing jabatan struktural tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Tugas pokok kepala dinas :

- 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Menetapkan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b. Menyediakan perlengkapan jalan di jalan daerah;
 - c. Mengelola terminal penumpang Tipe C;
 - d. Menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan;

- g. Mempersetujui hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan;
 - h. Mengaudit dan menginspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan;
 - i. Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - j. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - k. Menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - l. Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - m. Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
 - n. Menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - o. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
2. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan juga membantu Bupati dalam melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2) Tugas pokok sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, Memantau, Mengevaluasi dan Melaporkan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINHUB.

3) Tugas pokok kepala sub bagian perencanaan dan keuangan :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINHUB.

4) Tugas pokok kepala sub bagian umum dan kepegawaian :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINHUB.

5) Tugas pokok kepala bidang lalu lintas :

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok untuk merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, memantau, mengevaluasi serta pelaporan dalam bidang Manajemen Lalu Lintas, Manajemen Parkir, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

6) Tugas pokok kepala seksi manajemen lalu lintas :

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/jaringan transportasi jalan sekunder, inventarisasi jalan, survey lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, analisi dampak lalu lintas, pemberian rekomendasi penggunaan jalan dan bantuan pengamanan.

7) Tugas Pokok Kepala Seksi Manajemen Parkir :

Kepala Seksi Manajemen Parkir mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum, inventarisasi dan pendataan parkir di tepi jalan umum, survey potensi, penetapan lokasi dan besaran retribusi parkir, persyaratan administrasi dan penetapan petugas parkir di tepi jalan umum, pemberian rekomendasi penyelenggaraan tempat khusus parkir, penerbitan surat tugas parkir, pembinaan dan penertiban.

8) Tugas pokok kepala seksi sarana dan prasarana lalu lintas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, fasilitas pendukung di jalan provinsi yang berada di Daerah.

9) Tugas pokok kepala bidang angkutan :

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas untuk merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi serta pelaporan bidang Manajemen Angkutan Umum, Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

10) Tugas pokok kepala seksi manajemen angkutan umum :

Kepala Seksi Manajemen Angkutan Umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan, survey, pengaturan jaringan trayek, perencanaan umum jaringan trayek perkotaan/pedesaan, pemberian izin trayek angkutan kota/perdesaan, pemberian rekomendasi izin

operasi angkutan sewa, angkutan pariwisata, taksi, angkutan khusus, pentapan tarif angkutan kota/pedesaan, pembangunan terminal penumpang dan barang, pengelolaan terminal Tipe C, serta pemantauan/pembinaan unjuk kerja armada angkutan orang di terminal penumpang.

11) Tugas pokok seksi pengendalian dan penertiban Angkutan :

Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan, pengujian kendaraan bermotor, audit, inspeksi keselamatan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan, pembinaan, penertiban, pemeriksaan, penyidikan dan penindakan terhadap angkutan orang dan barang.

12) Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum :

Kepala Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, pengawasan teknis dan pembinaan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

B. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

a) Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinhub Kabupaten Purbalingga didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Jumlah Pegawai | : 92 (Sembilan puluh dua) orang |
| Pegawai Negara Sipil | : 48 (empat puluh delapan) orang |
| PTT SK. Bupati | : 13 (tiga belas) orang |
| PTT SK. Kepala Dinas | : 15 (lima belas) orang |
| THL SK. Kepala Dinas | : 16 {enam belas} |

2) PNS Berdasarkan Pendidikan

S2	: 3 (tiga) orang
S1	: 14 (empat belas) orang
Diploma III	: 5 (lima) orang
Diploma II	: 4 (empat) orang
SLTA	: 17 (tujuh belas) orang
SLTP	: 3 (tiga) orang
SD	: 2 (dua) orang
Jumlah	: 48 (empat puluh delapan) orang

3) PNS Berdasarkan Golongan

Golongan IV	: 3 (tiga) orang
Golongan III	: 21 (dua puluh satu) orang
Golongan II	: 22 (dua puluh dua) orang
Golongan I	: 2 (dua) orang
Jumlah	: 48 (empat puluh delapan) orang

4) PNS Berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki	: 41 (empat puluh satu) orang
Perempuan	: 7 (tujuh) orang
Jumlah	: 48 (empat puluh delapan) orang

b) Pembagian Pesonil :

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	KEPALA DINAS	1	
1	SEKRETARIAT	12	10
2	BIDANG ANGKUTAN		
	a. INDUK (KANTOR)	15	17
	b. PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	7	5
	c. TERMINAL BUKATEJA	2	4
	d. TERMINAL KEJOBONG	1	1
	e. TERMINAL KUTASARI	0	4
	f. TERMINAL KUTABAWA	0	2
	g. TERMINAL Jompo	0	2
	h. TERMINAL Penaruban	-	2
3	BIDANG LALU LINTAS	9	3
	JUMLAH	48	44

c) Sarana Dan Prasarana Kantor

(a) Prasarana Infrastruktur Gedung pada Dinas Perhubungan terdiri dari :

- Gedung Kantor Dinas
- Gedung Terminal Bukateja
- Gedung Terminal Kejobong
- Gedung Terminal Kutabawa
- Gedung Sub Terminal Penaruban
- Gedung Sub Terminal Jompo
- Gedung Terminal Kutasari
- Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

(b) Sarana Operasional (Kondisi belum tersahkan dengan kominfo krn belum ada BA erah terima dari Aset).

- Kendaraan Roda empat :12 (dua belas) unit
- Kendaraan Roda dua :18 (delapan belas) unit
- Sarana Komputer / Printer :28 (dua puluh delapan) unit
- Laptop : 12 (dua belas) unit
- Pesawat Telepon : 2 (dua) unit
- Pesawat HT : 42 (empat puluh dua) unit
- Repeater : 1 (satu) paket
- Peralatan PKB : 1 (satu) paket
- Peralatan Perbengkelan : 1 (satu) paket

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinas Perhubungan terdiri dari KIB A – E senilai Rp. 85.134.768.374,- (Delapan Puluh Lima milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah).

d) Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sarana perhubungan dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen).

Adapun fasilitas Dinas Perhubungan yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

1. Fasilitas Angkutan :

- a) Panjang jalan di wilayah Kabupaten Purbalingga mencapai 888.084 Km yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 888.710 Km, kerikil sepanjang 42 Km dan jalan tanah sepanjang 52 Km.
- b) Kendaraan niaga yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.061 kendaraan, terdiri dari 40 unit kendaraan antar kota antar propinsi (AKAP), 295 unit kendaraan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota 211 unit, angkutan perdesaan 452 unit, 12 unit angkutan pariwisata, 21 unit angkutan antar jemput dan Taksi 30 Unit.

2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi di kabupaten purbalingga terdapat 1(satu) terminal type A,yaitu Bobotsari dan 1 buah terminal type B, yaitu Terminal Purbalingga serta 4 buah terminal type C yaitu Terminal Bukateja, Kejobong, Kutasari dan Kutabawa dan 2 (dua) sub terminal, yaitu sub terminal Penaruban dan sub terminal Jompo.

3. Fasilitas Lalu Lintas :

FASILITAS Perlengkapan Jalan	JUMLAH	
	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
Marka Jalan	63,6 km	97,84 km
Rambu-rambu	515 bh	480 bh
RPPJ	69 bh	87 bh
Deliniator	105 bh	146 bh
Safety Mirror	10 bh	20 bh
Guard Raill	1032 m	2396 m
Traffic Light	14 unit	10 unit
Warning Light	15 unit	22 unit

Paku marka	460 buah	
Road Barrier		50 buah
Traffic cone		95 buah
LPJU	616 unit	5.767 unit

4. KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN . 2016 -2021

NO	SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN	JUMLAH YG DIBUTUHKAN 5 TH {2016 - 2021}	RENCANA ALOKASI
1	Marka Jalan	888.087	- Rembang - Karangreja - Kaligondang - Pengadegan - Karangjambu
2	Rambu-Rambu	1000	- Purbalingga - Bukateja - Kemangkon - Rembang
3	RPPJ	200	- Bobotsari - Karanganyar - Rembang - Kutasari
4	Deliniator	200	- Purbalingga - Karangreja - Bojongsari
5	Safety Mirror	50	- Karangreja - Karangjambu
6	Guardrail	3500	- Karangjambu - Karangreja
7	Traffic Light	14	- Purbalingga - Kalimanah
8	Warning Light	50	- Kutasari - Karangjambu
9	Road Barrier	200	- Inventaris Dinhub
10	Paku Marka	5000	- Karangreja

			- Karangjambu - Karangmoncol
11	Halte	17	- Kertanegara - Karangmanyar
12	LPJU	500	- Kab. Purbalingga
13	Terminal	10	- Rembang - Tunjung Muli - Gembrungan - Kragean

C. KINERJA PELAYANAN OPD

Perhubungan

Perhubungan merupakan infrastruktur penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor pembangunan Daerah. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan system transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis. Terminal menjadi salah satu sarana perhubungan yang sangat penting. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (kemenhub 35/2003). Jumlah terminal yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2015 sebanyak 6 terminal dari kebutuhan sebanyak 10 terminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan terminal angkutan penumpang belum dapat memenuhi kebutuhan terminal.

Selanjutnya dilihat dari jumlah perpanjangan ijin trayek ada kecenderungan semakin meningkat tiap tahunnya, hal ini terbukti tahun 2011 jumlah perpanjangan trayek sebanyak 122 trayek dan pada tahun 2013 meningkat sampai dengan 180 trayek. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan angkutan umum di Kabupaten Purbalingga semakin Meningkat. Demikian juga terkait dengan uji KIR dan kepemilikan KIR angkutan semakin meningkat dan pelayanan

pengujian KIR semakin baik dengan target waktu yang dibutuhkan setiap uji KIR hanya memerlukan waktu 20 menit selesai. Dilihat dari prosentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang atau lulus uji emisi sudah mencapai angka 100%, kondisi ini menggambarkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kualitas udara sangat tinggi dan dukungan masyarakat khususnya pemilik kendaraan untuk selalu memerlukan uji gas emisi semakin meningkat.

Tabel 1:
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten
Purbalingga
Tahun 2011 -2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah terminal Yang Beroperasi	Unit	6	6	6	6	6
2	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	3	3	3	3	4
3	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kab/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji perhubungan bermotor min 4000 kendaraan wajib uji	Unit	1	1	1	1	1
4	Rasio ketersediaan angkutan kota terhadap penumpang	%	0,031	0,032	0,032	0,064	0,064
5	Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan (perpanjang)	Unit	122	99	180	141	103
6	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	9.034	9.584	10.359	11.261	11.999
7	Persentase kendaraan angkutan umum tidak memiliki KIR angkutan	%	6,16	5,21	5,87	5,13	3,60
8	Lama pengujian KIR	Menit	20	20	20	20	20
9	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji	%	100	100	100	100	100

	emisi)						
10	Teredianya fasilitas perlengkapan jalan : rambu standar, marka, guardiil, RPPJ, Traffic light, warning light, delineator dll pada jalan kabupaten	%	91,72	84,69	82,70	93,51	93,51
11	Parkir on street (titik)	Titik	245	245	250	250	273

Disamping hal tersebut diatas, hasil yang telah dicapai selama 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemberhentian bagi penumpang (halte) meningkat dari semula 3 unit sekarang menjadi 9 unit halte;
2. Parkir tepi jalan umum (on street) mengalami peningkatan, hal ini disebabkan banyak toko yang tidak menyediakan lahan parkir, pada tahun 2011 sebanyak 245 titik menjadi 273 titik pada tahun 2015.

Tabel 2 :
Tabel: Parkir On Street

No	Tahun	Jumlah Titik
1	2011	245 titik
2	2012	245 titik
3	2013	250 titik
4	2014	250 titik
5	2015	273 titik

3. Pengelolaan perparkiran diprioritaskan untuk mengurangi gangguan samping berupa parkir ditepi jalan umum yang berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk pengelolaan pendapatan retribusi parkir, Kabupaten Purbalingga menerapkan system swakelola, yaitu petugas Dinas Perhubungan melakukan pengumpulan retribusi dari juru parkir yang sudah terdaftar. Kedepan akan dilakukan evaluasi dan perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada guna peningkatan PAD.
4. Pelayanan angkutan di terminal, tahun 2011 – 2015 Dinas Perhubungan memberikan pelayanan di 6 (enam) terminal, yaitu

Terminal Purbalingga (type B), Bobotsari (type A), Bukateja, Kejobong, Kutasari, Kutabawa (type C). Dengan diberlakukannya UU no. 23 tahun 2014 kewenangan penanganan terminal Purbalingga dan Bobotsari berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi untuk terminal Putrbalingga dan Pemerintah Pusat untuk terminal Bobotsari. Sehingga kedepan mulai tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Purbalingga hanya mempunyai kewenangan atas terminal Bukateja, Kejobong, Kutasari, Kutabawa (type C).

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan pengamatan terhadap Renstra Kementrian Perhubungan , Rentra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wlayah Kabupaten Purbalinga, dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Sistem transportasi regional Kabupaten Purbalingga berada di jalur tengah Pulau Jawa. Keberadaan wilayah Kabupaten Purbalingga di wilayah regional Jawa Tengah memiliki peran dan fungsi sebagai salah satu kota yang mendukung perkembangan jalur tengah pulau jawa. Sistem transportasi yang membentuk pola linear memberikan dampak terhadap perkembangan aktivitas perkotaan yang juga mengikuti pola jaringan transportasi. Di samping itu peningkatan sistem jaringan transportasi juga diorientasikan untuk peningkatan konektivitas antar kawasan baik antar kawasan sebagai fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), maupun Pusat Pelayanan (PPL).
2. Jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah jaringan transportasi darat khususnya jaringan jalan. Jaringan jalan dapat digolongkan berdasarkan status, system dan fungsi, serta kelas. Kabupaten Purbalingga merupakan jalur transportasi selatan yang cukup padat menghubungkan Purwokerto – Semarang. Berdasar statusnya, jaringan jalan yang ada Kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi jalan provinsi dan jalan Kabupaten. Jalan Provinsi, adalah ruas jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, yaitu jalan yang menghubungkan

Purbalingga – Banjarnegara/ Semarang, Purbalingga – Purwokerto/ Jakarta, Purbalingga – Pemalang. Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu seluruh jalan yang bukan jalan Provinsi.

3. Lampu Penerang Jalan Umum, sesuai UU 23 tahun 2014 dan sejak tahun 2017 pengelolaan LPJU diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Sampai dengan tahun 2017 LPJU yang sudah terpasang di Kabupaten Purbalingga sebanyak 6.383 unit, yang ditempatkan di jalan propnsi sebanyak 616 unit dan di jalan Kabupaten sebanyak 5.767 unit.
4. Kabupaten Purbalingga Mempunyai beberapa simpul terminal, yang dalam perkembangan ke depan akan direncanakan sebagai berikut:
 - Terminal Tipe A berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direncanakan di Kawasan Perkotaan Bobotsari;
 - Terminal Tipe B berfungsi untuk melayani Angkuatan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direncanakan di Kawasan Perkotaan Purbalingga;
 - Terminal Tipe C berfungsi untuk melayani angkutan antas pusat kegiatan direncanakan di : Perkotaan Bukateja, Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari, Desa Kejobong Kecamatan Kejobong, Desa Losari kecamatan Rembang, Desa Krangean Kecamatan Kertanegara, Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Desa Karang jambu Kecamatan Karang Jambu dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja.
 - Sub terminal berfungsi untuk melayani antar pusat pergerakan direncanakan di desa Kutabawa Kawasan Agrp Pariwisata Karangreja, Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk pelayanan transportasi di Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa peluang yang harus ditindak lanjuti, yaitu

1. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan.
2. Pengembangan pelayanan transportasi massal yang representative (BRT) di jalan-jalan utama yang menghubungkan wilayah bangkitan dan tarikan perjalanan serta menghubungkan simpul-simpul transportasi yang dilengkapi dengan angkutan lingkungan di wilayah permukiman yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) bagi pelayanan transportasi massal (BRT).
3. Disamping jaringan transportasi darat, rencana Pemerintah yang ingin mengaktifkan kembali / reaktifasi jalur kereta api Purwokerto – Wonosobo diharapkan akan meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten Purbalingga dengan wilayah sekitarnya. Reaktifasi jalur kereta api yang diarahkan untuk pengembangan sistem kereta api antar kota yang menghubungkan Perkotaan Purwokerto dengan wilayah Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Purbalingga yang akan terlewati jalur kereta api meliputi Perkotaan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kemangkon.
4. Untuk memenuhi permintaan pasar, selain pengembangan jalur transportasi darat dan kereta api , untuk meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten-kabupaten di **BARLINGMASCAKEB** dengan wilayah lain, pengembangan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman menjadi bandara untuk penerbangan umum sipil/komersil menjadi hal yang mendesak untuk direalisasikan. Adapun hierarki penerbangan yang dikembangkan akan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Bandara ini terletak di antara Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon, tepatnya di Desa Wirasaba, Desa Kemangkon, Desa Kedunglegok dan Desa Penican.

Bandara Jenderal Besar Soedirman berdasar hierarki Bandar udara saat ini termasuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyeberangan. Bandara ini berperan melayani penumpang dalam jumlah kecil. Berdasarkan wilayah pelayanan penerbangan termasuk Bandar udara Domestik. Untuk lebih menunjang pengembangan bandara Jenderal Besar Soedirman menjadi Bandara Komersil sebagai bandara pengumpan melalui penambahan landasan pacu, taxiway,

pembangunan apron, pembangunan hanggar, pengembangan pengelolaan komersil dan interkoneksi dengan system jaringan penerbangan nasional. Rencana pengembangan bandara Jenderal Besar Soedirman saat ini sedang berjalan sesuai pentahapan yang telah dirancang

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam satu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan yang dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksud guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisa Gambaran Umum selama 5 tahun, maka Permasalahan Pembangunan bidang Perhubungan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi.

Secara umum permasalahan transportasi di Kabupaten Purbalingga tidak banyak berbeda dengan daerah lain. Permasalahan transportasi pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas,

isu lingkungan, keselamatan, pelayanan angkutan umum, efisiensi dan efektifitas.

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis.

Tabel 3 :
DATA KENDARAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JENIS KENDARAAN	2015	2016
1	RODA 2 (SEPEDA MOTOR)	267.961	291.010
2	RODA EMPAT (Minibus, sedan, jip)	13.502	15.606
3	Angkutan Umum (angkot, AKDP, AKAP)	447	465
4	Kendaraan Angkutan (Truck, pick up, Box)	9.123	9.837

Sumber : Data satlantas Polres Purbalingga

Terminal menjadi salah satu sarana perhubungan yang cukup penting. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Kemenhub 35/2003). Jumlah terminal yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2015 sebanyak 6 (enam) terminal dari kebutuhan sebanyak 10 terminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan terminal angkutan penumpang belum dapat memenuhi kebutuhan terminal. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis.

B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJMD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 Adalah **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Purbalingga yang **Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang **Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dalam persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh

dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komperatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang **Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan matrial maupun yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari **Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi terebut, telah juga disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam 2016 – 2021, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 6 : *" Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai"* dan Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi pengadaan dan pemasangan LPJU, perlengkapan jalan dan terminal.

C. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

**Tabel 4 :
Telaah Renstra Kementerian Perhubungan :**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenhub	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai	Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan,	Rencana pengadaan/ penambahan rambu marka, guard rail dll

		terutama rambu, marka dan guard rail, dll.	hilang dan bencana	
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal		Perencanaan angkutan umum massal koridor BRT, Reaktifasi Jalur Kereta Api, Pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman

**Tabel 5 :
Telaah Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa tengah**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinhub Prop. Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinhub	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail, dll.	Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan, hilang dan bencana	Rencana pengadaan/ penambahan rambu marka, guard rail dll
2.	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal		Perencanaan angkutan umum massal (BRT), Reaktifasi Jalur Kereta Api, Pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman

**Tabel 6:
Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinhub	Permasalahan Pelayanan Dinhub	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Rencana pengembangan pelayanan angkutan jalan dan penumpang	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan modal		Perencanaan angkutan umum massal koridor BRT, Kereta api

		transportasi massal		
2.	Rencana prasaran pelayanan angkutan jalan	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail	Masih rendahnya kondisi prasaran akibat kerusakan	Rencana pengadaan/penambahan rambu marka, guard rail dll
3.	Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang	Kurang optimalnya pelayanan terminal		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan terminal type C dan atau sub terminal - Pengembangan terminal type A Bobotsari
4.	Penembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman	Belum terlayannya penumpang melalui jalur udara		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Bandara jenderal besar Soedirman menjadi bandara komersil

D. Penentuan Isu – Isu Strategis

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era *globalisasi* di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu transportasi massal (BRT), Transportasi Kereta Api dan transportasi udara.

Untuk mewujudkan terselenggaranya transportasi massal bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Dinas

Perhubungan sudah melaksanakan kajian detail engineering untuk pembukaan dan pengadaan moda transportasi massal (BRT). Terkait reaktifasi jalur kereta api telah diadakan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah bertempat di Bakorwil Wilayah III. Untuk transportasi udara, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan terus berupaya dan berpartisipasi aktif untuk melakukan koordinasi dan memberi dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk mewujudkan pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman menjadi Bandar Udara (*in clove sipil*)

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Pembangunan bidang Perhubungan dilakukan melalui misi ke-6, yaitu : *" Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai"* Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi Prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan pemukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke – 6 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah : *"Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan"*. dengan indikator kinerja, yaitu Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Tabel 7:
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2016 – 2021

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	Angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan	Persen	persen	60	49	46	44	42	40
			1. Persentase Sarana Dan Prasarana Perhubunga yang memadai	persen	Persen	50	60	65	70	75	80

Tabel 8 :
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	1. Presentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Peningkatan Kualitas, kuantitas perlengkapan jalan dan pengelolaan perparkiran	Meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan perlengkapan jalan serta pelayanan perparkiran
			2. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Tehnis	Peningkatan kualitas dan kwanntitas ASN perhubungan	mendukung Reaktifasi Jalur Kereta api, pengadaan tranportasi massal dan pembukaan akses transportasi udara

B. Strategi Dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan, Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinhub Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka RENSTRA-Dinas Perhubungan disusun dengan berpedoman dan atau

memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prop. Jawa tengah

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan melaksanakan misi yang ke 6, yaitu : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana kewilayahan yang memadai.

Adapun strategi yang digunakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Misi ke - 6 RPJMD adalah sebagai berikut : pemenuhan sarana prasarana utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi massal (BRT), perkeretaapian, udara komersial, dengan arah kebijakan berupa penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum serta Reaktifasi jalur kereta api, fasilitasi pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman dan pembukaan transportasi massal (BRT), peningkatan pelayanan di bidang transportasi darat (jalan dan terminal)

Tabel 9
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam
Pencapaian Misi 6

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	Peningkatan Kualitas, kuantitas perlengkapan jalan dan pengelolaan perpajakan	Peningkatan pemenuhan sarana prasarana utama dan penunjang angkutan jalan
2		Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN perhubungan	mendukung Reaktifasi Jalur Kereta api, pengadaan transportasi massal dan pembukaan akses transportasi udara.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

I. PROGRAM

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam 5 (lima) Program, yaitu :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

II. KEGIATAN

Dari program – program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya dapat dilaksanakan selama kurun waktu 2016 – 2021. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah:

- a) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- b) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- d) Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- e) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- f) Pendidikan dan pelatihan pegawai
- g) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja
- h) Pembuatan Ruang/gudang

2. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas, dengan kegiatannya :

- a) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
- b) Pengadaan dan Pemasangan LPJU
- c) Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas
- d) Penataan dan Pengelolaan Parkir
- e) Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
- f) Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- a) Pembinaan dan Monitoring Angkutan
- b) Perencanaan dan Pengaturan angkutan umum
- c) Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal
- d) Operasional dan Pemeliharaan Terminal

e) Penertiban, Pembinaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

III. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 10 :
Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan 2016-2021

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	PENDANAAN INDIKATIF					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksannanya system akuntabilitas SKPD <ul style="list-style-type: none"> - Presentase pelaksanaan kegiatan OPD tepat waktu - Presentase realisasi anggaran OPD • Jumlah kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor • Jumlah prasarana dan sarana kantor terpelihara • Jumlah ASN diklat/bimtek pegawai • Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public 	100%	1 Pengadaan Bahan dan Jasa Perkantoran 2 Rapat-rapat Koordinasi 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5 Diklat Pegawai 6 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 7 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja 8 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal 9 Pembuatan Ruang / gudang, gedung	801.485	701.485	801.485	801.485	801.485	801.485
					120.000	120.000	132.000	132.000	132.000	145.000
					290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
			12 bln		242.975	42.975	1.250.000	540.000	350.000	400.975
			12 bln		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
			15 ASN		50.000	69.880	70.000	70.000	85.000	85.000
			100%		10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
					-	300.000	-	-	-	-
					-	-	650.000	500.000	5000.000	-
2	Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	1. Presentase fasilitas perlengkapan jalan 2. Parkir on street	85%	1 Penyediaan Fasilitas perlengkapan jalan 2 Pemeliharaan & pengecatan traffic light, warning light halte dan fasilitas perlengkapan jalan yang lain 3 Perencanaan dan	1.875.665	1.909.000	1.577.200	1.936.400	1.635.000	2.043.000
			350 titik		140.000	170.000	150.000	185.000	200.000	250.000
					240.550	315.550	370.500	325.500	380.550	343.500

				Pengaturan Lalu Lintas (PAM, survey LL, Forum LLAJ, WTN, Andalalin, CFD)						
				4 Penataan dan Pengelolaan Parkir	20.000	150.000	270.000	290.000	315.000	355.000
				5 Pemeliharaan Lampu Penerang Jalan Umum	950.000	1.250.000	1.270.000	1.290.000	1.650.000	1.700.000
				6 Pengadaan dan Pemasangan LPJU	-	5.000.000	5.500.000	9.500.000	7.000.000	9.000.000
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.Jumlah kendaraan yang laik jalan 2.Jumlah angkutan umum masuk terminal	95% 97%	1 Pembinaan dan monitoring angkutan 2 Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor {PKB} 3 Pembangunn dan rehabilitasi terminal 4 Operasional dan pemeliharaan terminal 5 Penertiban, pembinaan dan pengendalian Lalu Lintas dan angkutan jalan	10.000 16.513.710 410.000 320.058 20.000	175.000 30.765.000 525.000 310.000 24.000	180.000 880.000 800.000 510.000 35.000	195.000 205.000 400.000 110.000 45.000	190.000 740.000 440.000 330.000 45.000	195.000 95.000 500.000 110.000 45.000

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 -2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Data Capaian Tahun pd awal perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
							2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		target	Rp (jt)
	Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai																		
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai	1	Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan 49,8	50	3,226.22	55	8,794.55	65	9,137.70	70	13,526.90	75	11,180.55	85	13,691.50	
					Kegiatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	Marka Jalan 15,000 km	200		750		2000		3,000		4,000		5050		
						Rambu Standar	1,000 bh	25		50		75		284		283		283	
						RPPJ	44 bh	2		5		5		8		12		12	
						Guardrail	2,000 m	200		400		200		300		400		500	
						Traffic Light	14 unit	1		2		2		3		3		3	
						Warning Light	18 unit	1		2		2		3		5		5	
						Traffic Cone	330 buah	25		50		50		60		70		75	
						Paku Marka	1,400	250		250		200		200		250		250	
						Road Barrier	140 buah	20		10		20		30		30		30	
						Deliniator	200	200		0									
						Safety Mirror	25	10		0		0		5		5		5	
						Halte	35	6		0		6		7		8		8	
						LPJU	3600	500		500		550		683		683		684	
						Terminal	10	6		0				1		1		2	
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Jumlah kendaraan yang laik jalan	80	17,273.77	84	31,799.00	89	2,405.00	92	955.00	93	1,745.00	95	945.00				
		2	Jumlah angkutan umum masuk terminal	90		91		93		95		96		97					
			Penertiban dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan	Jumlah operasi laik jalan	16		19		12		12								
			Perencanaan dan pembinaan angkutan	Jumlah awak angkutan yang dibuna		16.513.710	30.765.000		880.000		250.000		740.000		95.000				

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan	Persen	Data Satlantas	persen	60	49	46	44	42	40
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Perhubunga yang memadai	persen	$\frac{\text{Jml Sarpras yg tersedia} \times 100}{\text{Sarpras yg dibutuhkan}}$	Persen	50	60	65	70	75	80

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra - OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan serta menentukan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Renstra-OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka RENSTRA-Dinas Perhubungan disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Prop. Jawa tengah

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan melaksanakan misi Kabupaten Purbalingga yang ke 6, yaitu : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung

dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana kewilayahan yang memadai.

Adapun strategi yang digunakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Misi ke - 6 RPJMD adalah sebagai berikut : pemenuhan sarana prasarana utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi massal (BRT), perkeretaapian dan transportasi udara komersial, dengan arah kebijakan berupa penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum serta Reaktifasi jalur kereta api, fasilitasi pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman dan pembukaan transportasi massal (BRT), peningkatan pelayanan di bidang transportasi darat (jalan dan terminal)

Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan dalam masa transisi maka dalam penyusunan Renstra-OPD ini telah ditambahkan rancangan program kerja transisi satu program indikatif untuk 1 (satu) tahun ke depan sebagai pedoman/rujukan dan landasan hukum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pada tahun 2016.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra-OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sangat tergantung pada peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian RENSTRA-OPD Dinas Perhubungan disusun sebagai pedoman, acuan dan sekaligus dalam menentukan arah kegiatan 5 (lima) tahun kedepan dalam turut serta membangun Kabupaten Purbalingga, semoga bermanfaat. Terimakasih.

Purbalingga, Juni 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA



R. IMAM WAHYUDI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630418 198903 1 006